



**PENJELASAN UMUM TERKAIT KPBU DAN KETERTARIKAN PARA PIHAK DALAM MELAKSANAKAN KPBU**

**DASAR KEBIJAKAN**

**Perpres 38/2015**  
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagai landasan penyelenggaraan KPBU

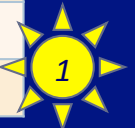
**Pasal 3 Perpres 38/2015**

- Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui **pengerahan dana swasta**;
- Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- Memberikan kepastian pengembalian investasi BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah/ pemerintah daerah kepada Badan Usaha.



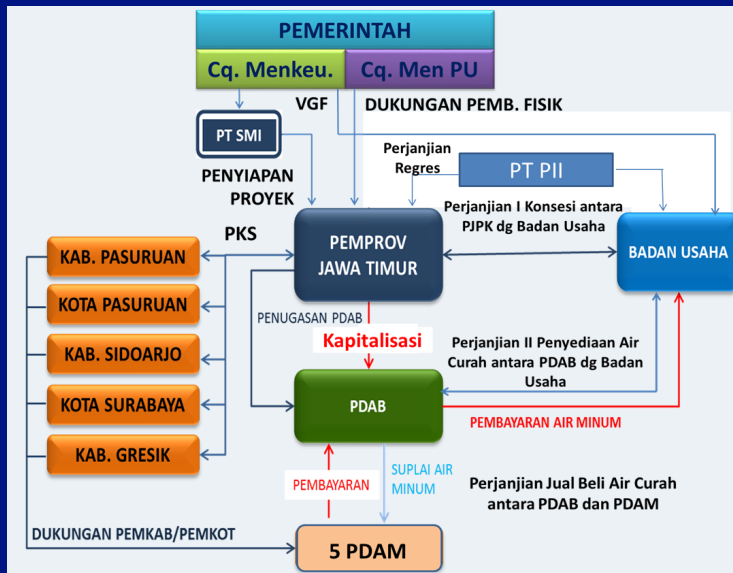
Perlu adanya Sosialisasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait agar mempunyai pemahaman, kebijakan dan komitmen yang sama dalam pelaksanaan KPBU

| SKEMA KONVENSIONAL  | SKEMA KPBU   |
|---|--|
| • <i>Inkonsistensi</i> mulai dari perencanaan, <i>design</i> konstruksi sampai pemeliharaan | ▪ Kesenambungan pelaksanaan yang dituangkan dalam Kontrak Jangka Panjang |
| • Keterlambatan pelaksanaan   | ▪ Meminimalisir resiko pelaksanaan proyek                                |
| • Tidak mengkaji aspek resiko   | ▪ Kajian aspek resiko  |
| • Resiko ditanggung 100 % Pemerintah  | ▪ Ada pembagian resiko   |
| • Pendanaan proyek sesuai nilai kontrak   | ▪ Bisa digunakan untuk infrastruktur yang lain                           |





**KEUNTUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DENGAN TERLAKSANANYA PROYEK PEMBANGUNAN SPAM UMBULAN DENGAN SKEMA KPBU**



**HARGA AIR BERSIH UMBULAN, JIKA :**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>SWASTA</b> | = Rp. 7.000 / M <sup>3</sup> |
| <b>PPP</b>    | = Rp. 2.400 / M <sup>3</sup> |

**KEUNTUNGAN LAINNYA**

- Efisiensi Pembiayaan Pembangunan karena kerjasama Pemerintah dengan Swasta
- Terlaksananya pembangunan SPAM dengan kualitas prima dan tarif terjangkau bagi masyarakat
- Terpenuhinya universal access bidang air minum layak dengan tambahan penerima manfaat sebanyak 1,3 juta jiwa
- Mendapatkan transfer kemampuan dan pengetahuan dari Swasta sehingga kedepannya menghasilkan pengelolaan infrastruktur dengan kualitas yang baik.
- Terlayaninya daerah rawan kekeringan



## TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI DENGAN SKEMA KPBU

### TANTANGAN PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI

- Komitmen politik Kepala Daerah dan DPRD terutama untuk lintas Kabupaten/Kota
- Pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat (*universal access*)
- Penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang *kredibel* dan *profesional*; dan
- Penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat.

#### PRINSIP :

**KPBU BUKAN PRIVATISASI DAN BUKAN MENGGUNAKAN DANA APBN**

### SOLUSI DENGAN SKEMA KPBU

- Persetujuan atau ijin prinsip terhadap proyek yang akan di KPBU kan dilakukan pada tahap persiapan/ perencanaan proyek dan tepat waktu;
- Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur air minum dan sanitasi melalui pengerahan dana swasta;
- Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan air minum dan sanitasi berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait



**HARAPAN DAN REKOMENDASI PEMENUHAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI DALAM  
PEMBANGUNAN FASILITAS DENGAN SKEMA KPBU**

**HARAPAN**

- Perlu adanya regulasi dan pedoman pelaksanaan KPBU yang *applicable* dan spesifik
- Komitmen Kepala Daerah untuk bersedia menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
- Perlu kesiapan SDM yang mempunyai kompetensi (*capacity Building*)
- Perlu dilakukan Pemeliharaan dan pelestarian di wilayah/area tangkapan (*catchment area*) Mata Air Umbulan perlu dilakukan secara serius, karena pola dan perilaku masyarakat yang tinggal di area tangkapan sangat mempengaruhi kelangsungan dan kelestarian Mata Air Umbulan.

**REKOMENDASI**

- Perlu adanya komitmen politik Kepala Daerah dan DPRD
- Perlu adanya penguatan kelembagaan dengan memberikan penyertaan modal ke BUMD.
- Perlu adanya training SDM Perangkat Daerah terkait dengan pemahaman dan tatakelola KPBU
- Perlu disusun kajian *Business Plan* untuk SPAM dan Sanitasi serta infrastruktur lainnya yang layak dilakukan dengan skema KPBU (19 Jenis)